

ABSTRAK

Banyak permasalahan didalam pengelolaan BMN diseluruh instansi, baik dalam pemahaman terhadap aturan, kurangnya koordinasi di internal instansi, maupun penyebab lainnya. Hal ini berdampak nilai negatif pada penilaian audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal (BPK, BPKP) terkait pengelolaan BMN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara detail tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Kopertis Wilayah “A” dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, disertai penggunaan instrumen pemantauan pengelolaan barang milik negara. Analisa dilakukan dengan menggunakan *compliance theory* (teori kepatuhan) dalam penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui proses wawancara, yang didukung dengan melaksanakan observasi dan dokumentasi, beserta penilaian dengan menggunakan kertas kerja.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tahap dalam pengelolaan BMN di Kopertis yang masih belum mengikuti prosedur aturan yang berlaku, yang disebabkan antara lain kurangnya SDM yang handal, kurangnya pemahaman terhadap peraturan terkait serta kurangnya koordinasi internal didalam instansi. Kebijakan pimpinan beserta adanya kemauan untuk memahami isi peraturan dari pengelola BMN, dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pelaksanaan pengelolaan BMN yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : Pengelolaan BMN, Teori Kepatuhan, PP Nomor 27 tahun 2014, Instrumen Pemantauan Pengelolaan BMN

ABSTRACT

Many problems in the management of state property throughout agencies, both in the understanding of the rules, lack of coordination in the internal agencies, as well as other causes. This has impact a negative value on audit assessments conducted by external auditors (BPK, BPKP) related to the management of state property. The purpose of this research is to know the detail level compliance of management in Kopertis Region "A" based on Government Regulation No. 27 of 2014, accompanied by the use of monitoring instruments for the management of state property. The analysis is done by using compliance theory in qualitative research with case study method. The research data was collected through the interview process, supported by observation and documentation, along with the assessment using the working papers.

The results revealed that there are several stages in the management of state property in Kopertis which still do not follow the applicable rules procedure, which is caused by lack of reliable human resources, lack of understanding on related regulations and lack of internal coordination within the agency. Leadership policy along with the willingness to understand the contents of the regulations of the manager, can provide a positive contribution in the implementation of better management of state property.